

By H. M. Sahan

Abstract : Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan tentang banyaknya konflik atas nama agama dan etnis, juga karena masyarakat Indonesia terdiri dari banyak ragam suku dan agama. Maka, pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan mentransformasikan kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, etnis dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog.

Pendidikan multicultural dalam pendidikan Islam adalah penekanan pembelajaran agama Islam yang menjunjung tinggi dan berusaha mengembangkan potensi untuk bersama melaksanakan kepentingan kemanusiaan. Karena seluruh agama selalu mengklaim demi keselamatan manusia. Di sini pendidikan agama, terutama pendidikan Islam, memiliki peran penting untuk menumbuhkan sikap awal agar bisa bekerja sama dengan agama atau keyakinan yang lain. Pendidikan agama harus memungkinkan tumbuhnya persaudaraan dalam kebersamaan menemukan tradisi ilahi yang sama pada setiap agama, sehingga bisa bersama membangun dunia baru yang lebih bermakna bagi seluruh umat manusia

Oleh H. M. Sahan

Pengantar

Masyarakat modern dihadapkan pada masalah adanya kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Di abad modern ini terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kehidupan. (1) di bidang budaya, masyarakat abad ke 21 sedang menuju pasca-ideologis, yakni sebuah era yang lebih berorientasi pada nilai pluarlisme dan multikulturalisme. (2) dalam bidang agama, lambat atau cepat, suatu masyarakat dunia yang *multiconfensional* akan muncul. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang bisa memeluk banyak agama, tetapi harus menumbuhkan sebuah pengakuan bahwa kebaikan itu ada di banyak agama dan pemeluk agama.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar di dunia. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa secara sosio-kultur maupun geografis, Indonesia menjadi Negara dan bangsa yang berpenduduk multietnik, multi-agama, dan multi-kultur. Indonesia sebagai Negeri dan Bangsa,² memiliki jumlah wilayah sekitar kurang lebih 13.000 pulau besar

¹ Achmad Jainuri, "Pluralisme Agama dan Multikulturalism: Dasar Teologi dalam Pengalaman Agama," dalam *Reinvensi Islam Multikultural*, ed. Zakiyuddin Baidhaw-M. Thoyibi (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 58.

² Ada beberapa konsep yang sering dipakai dan disamakan begitu saja, padahal pemakaian konsep tersebut sangat problematis. Seperti konsep "negeri" (*country*), "bangsa" (*nation*), "negara" (*state*), "masyarakat" (*society*), dan "rakyat" (*people*). Menurut antropolog kebangsaan Amerika, Clifford Geertz, yang di kutib oleh F. Budi Hardiman dalam pengantarnya, *Belajar dari Politik Multikulturalisme* menegaskan bahwa pasangan konsep "negeri" dan "bangsa" sangat problematis. Kalau keduanya disamaratakan begitu saja, maka konsep yang awal akan ditelan oleh yang terakhir, dan akan mengecoh pemahaman, seakan sebuah negeri didiami oleh satu bangsa saja. Padahal "bangsa" adalah kumpulan orang dengan bahasa, darah, sejarah dan tanah yang sama, dan "negeri" adalah teritorium atau tanah dari kumpulan orang tersebut. Dengan kata lain, "negeri"

dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik, Kristen protestan, hindu, budha, konghucu, serta berbagai macam kepercayaan.³

Dilihat dari berbagai segi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (plural) dari segi etnis ada 1072 suku . dimana suku-suku yang ini membentuk suku-suku besar dan kecil. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan seluruh wilayah Nusantara, dari segi pulau yang dihuni terdapat sekitar 13.000 lingkungan kepulauan. Dari segi sejarah politik local terdapat puluhan bahkan ratusan sistem kerajaan-kerajaan, kesukuan lama yang berpengaruh terhadap sistem stratifikasi social dan adat istiadat setempat. Konteks Indonesia yang plural ini barangkali bisa menyebabkan rawan terhadap konflik.

Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang sekarang ini dihadapi bangsa ini. Misalnya aksi anarkisme dan premanisme yang terjadi pada Minggu 1 Juni 2008. Dengan mengatasnamakan agama dan keberan hakiki Komando Laskar Islam (KLI) dan kelompok yang beratribut Front Pembela Islam (FPI) menyerang kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dalam momen peringatan lahirnya Pancasila. Hal ini tentunya ikut

merupakan arena politis (*political space*) tempat interaksi sosial ditata, peluang-peluang hidup dan sumber-sumber produktif dibagi-bagikan. Sedangkan, “bangsa” adalah kekuatan politis dalam arena itu. Seperti Indonesia, sebuah negeri bukan hanya multi-etnis (Jawa, Batak, Bugis, Flores, Bali, Aceh dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multi-mental (India, Cina, Belanda, Portugis, Buddhisme, Hindhuisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis dan seterusnya). Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna, karakter yang berbeda-beda yang melalui narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius yang dirajut menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama. Lihat, Will kymlicka, *Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Tentang Hak-hak Minoritas* ter. Edlina Hafmini Eddin (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), vii-viii.

³ M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural ; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 3 – 4.

menambah daftar persoalan atas pengakuan realitas pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia.⁴

Kemudian kerusuhan di ambon pada tanggal 19 Januari 1999, yang melibatkan dua agama yaitu Islam dan Kristen. Meskipun motif pada mulanya adalah pertentangan antar suku, akan tetapi kemudian merambah ke wilayah agama.⁵ Kerusuhan ini bukan murni masalah vandalisme saja tetapi juga dendam laten yang banyak dipicu oleh keributan sesaat ditambah masuknya elit politik pusat, pusat yang biasa mengobok-obok daerah, seperti halnya di Medan, Situbondo dan sebagainya.

Sifat realitas kekerasan dan konflik sosial yang aktual dan menyebar, membenarkan bahwa kekerasan hampir menjadi setelan mental (*mind-set*) dan nalar kolektif masyarakat maupun individu tentang multikulturalitas kebangsaan masih terkooptasi oleh *logosentrisme*⁶ tafsir hegemonik yang sarat akan prasangka, kecurigaan, bias, kebencian, dan reduksi terhadap kelompok yang berada di luar dirinya (*the other*), serta pemahaman tentang teologi yang masih sangat eksklusif yang tumbuh dan berkembang di internal umat beragama. Akibatnya, ikatan-ikatan sosial (*societal bonds*) melalui kolektivitas dan kerjasama hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri (*in group*), tidak berlaku terhadap kelompok lain.⁷

Di atas fakta tersebut, di sini gagasan tentang pendidikan multikulturalisme menjadi suatu tawaran gerakan sosial-budaya baru yang

⁴ Abdul A'la, “Kebebasan Anarkis”, *Kompas*, 3 Juni 2008, 6. Selanjutnya, catatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dapat ditelusuri dalam *Jawa Pos*, 3 Juni 2008, 15

⁵ Lihat Nong D.Mahmada dkk., *Luka Maluku: Militer terlibat*, (Yogyakarta: Institut Studi Informasi, 2000), hlm. 11

⁶ *Logosentris* adalah suatu sistem pemikiran yang melegitimasi suatu referensi yang eksternal, atau proposisi yang benar secara universal. Berbeda dengan kelompok post-modern, mereka menentang pemikiran *logosentris* tersebut. Mereka beranggapan bahwa sistem pemikiran logosentris pada dasarnya berakar pada logika *self-constitutive*. Dengan kata lain, cara berpikir *logosentris* sangat bersifat sirkuler, *self-preferential* dan *self-science*. Lihat H. A. R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), 304-305.

⁷ Lihat Masdar Hilmy, “Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikultural”, dalam *Ulumuna*, Vol. 07, (Desember, 2003), 332.

patut ditimbang dan menjadi alternatif untuk mengatasi problem bangsa yang pluralitas dan multi-kultur, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sebagai sebuah konsep, multikulturalisme menekankan dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan,⁸ baik secara individual maupun kelompok dalam ranah kebudayaan. Multikulturalisme, sebagai sebuah gerakan sosial-budaya megedepankan pengakuan terhadap masing-masing entitas perbedaan dengan sendirinya menghendaki dan mempunyai karakter yang beranekaragam identitas, sehingga masyarakat dapat mengartikulasikan dan mengevaluasi tradisi mereka dalam diskursus publik yang rasional. Gerakan ini (multikulturalisme) mengusung semangat yang sangat penting yakni *living together as one society*.⁹

Sekilas tentang Pendidikan Multikultural

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan dengan *mografis* dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Definisi ini dengan demikian terkait dengan kebudayaan dan kultur lingkungan. Ini berarti pembahasan multikultural tak dapat dipisahkan dari budaya dan lingkungan sekitar masyarakat.¹⁰

Seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat bernama Prudence Crandall (1803-1890) secara intensif menyebarkan pandangan tentang pendidikan multikulturalisme, yaitu pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dari keragaman suku (etnis), ras, agama, (aliran kepercayaan), dan budaya (kultur).¹¹

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru

⁸ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, dalam <http://www.jai.or.id./Jurnal/2002/69>. 19 Juni, 2006, 99-100.

⁹ Lihat Jajang Jahroni, “Multikulturalisme: Mungkinkah di Indonesia?”, *Tsaqafah*, Vol. 01 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 3.

¹⁰ Said Agil Husain Al Munawar, *Aktualisa Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam Cetakan II*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005) h. 208

¹¹ Imam Machali, Musthofa, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi (Buah Pikiran seputar; Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004) h. 264

lagi. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan R. Stavenhagen:

*Religious, linguistic, and national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.*¹²

Sebagaimana dikemukakan Tilaar dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti inipernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau “*politics of recognition*”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.¹³

Apabila multikulturalisme merupakan wacana dalam bidang kebudayaan dalam arti luas seperti pengembangan identitas suatu kelompok masyarakat, demikian pula dalam pengembangan suatu Negara bangsa (*nation-state*) diperlukan rasa identitas dari kelompok bangsa itu. Selanjutnya suatu bangsa hanya dapat bertahan karena mempunyai kekuasaan (*power*). Kekuasaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat serta mengikat masyarakat itu dengan satu kesatuan kehidupan. Kekuasaan dengan demikian hanya dapat dikembangkan dalam lingkungan kebudayaan dalam arti yang luas. Oleh sebab itu juga pendidikan tidak terlepas dari wacana tersebut di atas.

¹² Muhaemin El-Ma'hady dalam www.researchengines.com. Diunduh pada hari sabtu, 28 agustus 2009

¹³ Said Agil Husain Al Munawar, *Op.cit.*, h. 208-209

Itulah juga yang disebut tinjauan studi kultural mengenai pendidikan, yang melihat proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembudayaan.¹⁴

Multikultural merupakan suatu tuntutan pedagogis dalam rangka studi kultural yang melihat proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Upaya kita untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang multikultural hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia Indonesia yang bebas, tetapi juga sekaligus terikat kepada suatu kesepakatan bersama untuk membangun suatu masyarakat Indonesia bersatu dalam wacana kebudayaan Indonesia yang terus menerus berkembang.

Pendidikan multikulturalisme yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama. Dengan demikian pendidikan multikulturalisme menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datang dan berbudaya apapun dia.

Meminjam pendapat Andersen dan Causher, bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Kemudian, James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). Kemudian, bagaimana kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.¹⁵

Menurut penelitian Banks, terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural di Amerika :¹⁶

a. Integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*).

Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalam kurikulum dan di mana atau bagian apa dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Isi kurikulum tersebut antara lain berkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi berbagai prasangka di dalam

perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis-etnis tertentu dan di dalam materi apa prasangka-prasangka tersebut dapat dikemukakan. Di dalam kaitan ini diperlukan studi mengenai berjenis-jenis kebudayaan dari kelompok-kelompok etnis. Di dalam kaitan *ethnic studies movement* sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat. Termasuk di dalam gerakan ini adalah menulis dan mengumpulkan sejarah dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat.

b. Konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*)

Di dalam kaitan ini dipelajari mengenai sejarah perkembangan masyarakat Barat dan perlakuannya, serta reaksi dari kelompok etnis lainnya. Sejarah berisi hal-hal yang positif maupun yang negatif yang perlu diketahui oleh peserta didik di dalam upaya mengerti kondisi masyarakatnya dewasa ini.

c. Pengurangan Prasangka (*prejudice reduction*)

Prasangka rasial memang dihidupkan sejak kanak-kanak. Di dalam pergaulan sesamanya mulai ditanamkan prasangka-prasangka yang positif maupun yang negatif terhadap sesamanya. Dengan pergaulan antar kelompok yang intensif, prasangka-prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerja sama yang erat dan saling menghargai. Peringatan akan pahlawan-pahlawan, tanpa membedakan warna kulit dan agamanya merupakan cara-cara untuk menanamkan sikap positif terhadap kelompok etnis tertentu. Nilai-nilai tersebut dimasukkan di dalam kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum itu sendiri. Akhirnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ditransformasikan di dalam perbuatan, misalnya di dalam memperingati hari-hari besar dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sekolah atau masyarakatnya.

d. Pedagogik kesetaraan antar manusia (*equity pedagogy*)

Kebudayaan berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan karena sikap yang tidak adil di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pedagogik yang memperhatikan antara lain kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan dengan kelompok anak-anak dari golongan menengah atau golongan atas.

¹⁴ Imam Machali, Musthofa, *Op.cit.*, h. 264-265

¹⁵ Choirul Mahfud. *Op.cit.*, h. 167

¹⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme*. hal. 138-140.

Demikian pula, ternyata ada kaitan antara intelegensi anak dengan kehidupan sosialnya. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin biasanya terhalang perkembangan intelegensinya dan oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan lebih seksama tentang perbaikan sosial ekonomi dari peserta didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang dilupakan.

e. Pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*)

Keempat pendekatan tersebut di atas semuanya bermuara kepada pemberdayaan kebudayaan sekolah. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut di atas dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya lahir kebudayaan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sekolah haruslah merupakan suatu motor penggerak di dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang karena kemiskinan ataupun tersisih di dalam budaya "mainstream" masyarakat.

Sebagai sebuah cara pandang sekaligus gaya hidup, pendidikan multikultural menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global. Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan budaya, multikulturalisme adalah bagian integral dalam pelbagai sistem budaya dalam masyarakat yang salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui pendidikan yang berwawasan multikultural.

Dalam buku *Paradigma Pendidikan Universal*, Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yaitu vertikal dan horizontal¹⁷ Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografinya, pakaian, makanan dan budayanya. Sementara, dalam perspektif

vertical kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari berbagai tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan dan tingkat social budaya¹⁸

Menurut pandangan penulis, dalam menghadapi kemajemukan budaya diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multicultural. Pendidikan berparadigma multicultural tersebut penting, sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam budaya, suku ras etnis maupun agama. Paradigma pendidikan multikultural mengandaikan bahwa seseorang hendaknya lebih apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman yang merupakan kekayaan dan khazanah bangsa Indonesia. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam didalam otak kita dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir.

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dengan berbeda jenis kelamin, bangsa, suku, warna kulit, budaya dan sebagainya. Manusia yang paling di sisi Tuhan adalah yang paling banyak amal kebajikan (bertaqwa). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-qur'an surat al-Hujarat ayat 13 " *Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu laki-laki dan perempuan (Bapak dan Ibu), dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah S.W.T ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar*" (Al-Hujarat;13.)

Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup,

¹⁷. Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi *paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: IRCiSod, 2004), hlm.1 90

¹⁸. Usman Pelly dan Asih Minanti, *Tiori-tiori Sosial Budaya* (Jakarta: Dirjen Pendidikan dan Budaya, 1994) hlm 68

pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.¹⁹

Sementara menurut Sonia Nieto, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komprehensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terrefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultur ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan *pedagogi* kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.²⁰

Sementara itu, Bikhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultur sebagai “*an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives*”²¹

Dari definisi diatas, hal yang harus digarisbawahi dari paradigma pendidikan multikultural adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu element dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya *inheren* dengan sikap pribadi ataupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas tersebutlah, mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda.

¹⁹ James A. Bank dan Cherry A. McGee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), hlm. 28

²⁰ Sonia Nieto. *Language, Culture and Teaching* (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2002), hlm. 29.

²¹ Bikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hlm. 230.

Dengan demikian dalam pendidikan multikultur, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi, baik internal budaya (*self critic*) maupun eksternal budaya. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam pendidikan multikultur.

Dalam masyarakat ditemukan perbagai individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam pendidikan, diversitas tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat -secara langsung atau tidak- dalam satu proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengkayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, pendidikan multikultur bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model pendidikan yang berjalan di atas rel keragaman. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Banks menjelaskan lima dimensi yang harus ada yaitu,²² *pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang didalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada.

Ketiga, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap element yang beragam. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultur yaitu agar sekolah menjadi element

²² James A. Banks. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice” dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee, *op. cit.*, hlm. 23-24

pengentas sosial (transformasi sosial) dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan.²³

Sementara itu, H.A.R. Tilaar menggariswahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu, *pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdismensi “*right to culture*” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimalkan budaya local yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada *xenophobia*, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama.

Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogic pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, antar agama dan beragam perbedaan yang ada. *Keenam*, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.²⁴

Disinilah fungsi strategis pendidikan multicultural sebagai sebuah proses dimana seseorang mengembangkan potensinya dalam berbagai system standar untuk mempersepsi, mengevaluasi menyakini dan melakukan tindakan. Dalam melaksanakan pendidikan multicultural ini

mesti dikembangkan persepsi solidaritas. Yakni, kesiapan untuk berjuang bergabung dalam perlawanan demi pengakuan perbedaan yang lain dan bukan demi dirinya sendiri. Solidaritas menuntut agar kita melupakan upaya-upaya penguatan identitas, melainkan menuntut kita agar kita berjuang bersama orang lain. Dengan berlaku demikian, kehidupan multicultural yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa merendahkan yang lain diharapkan segera terwujud.

Gagasan Islam tentang Multikultural

Menurut Fahmi Huwaydi, perbedaan di antara manusia dalam agama terjadi karena kehendak Allah SWT, dan orang Muslim meyakini bahwa kehendak Allah itu tidak ada yang dapat menolak dan mengubahnya, sebagaimana dia tidak berkehendak kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan hikmah.²⁵

Ungkapan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Qardawi dalam bukunya yang membahas orang-orang non Islam. Ia telah membuka pintu pemahaman bagaimana sikap Islam terhadap orang-orang non muslim yang hidup didalam Negara Islam atau diluar negeri Islam.

Nurchalish Madjid, mengatakan bahwa salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang mengharagai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkan sebagai suatu keniscayaan.²⁶

Multikulturalisme merupakan sebuah gagasan yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh keprihatinan maraknya konflik-konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan identitas budaya, etnik, agama dan sebagainya. Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas yang seringkali memunculkan konflik tersebut.

Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga

²⁵ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan masyarakat madani*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), hlm. 30-31

²⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), Kata Pengantar, hlm. ix - viii

²³ *Ibid*

²⁴ H.A.R. Tilaar, *op. cit.*, hlm. 185-190

agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama.

Kedua, pandangan kaum instrumentalis yang menganggap perbedaan suku, agama dan identitas yang lain sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya. Dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari *prefence* yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. *Ketiga*, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. Dalam hubungannya dengan pendapat yang ketiga ini terdapat ruang wacana multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman.

Gagasan multikulturalisme ini sesungguhnya memiliki akar teologisnya dalam al-Quran. Al-Quran, misalnya, mengajarkan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku agar saling mengenal. Proses saling mengenal ini kemudian menjadi isu sentral yang muncul dalam gagasan multikulturalisme. Pandangan ini berangkat dari pandang *ontologis-metafisis* Islam yang bersumber pada ajaran *tawhīd*.

Secara harfiah, *tawhīd* berarti kesatuan (*unitas*) yang secara absolut berarti mengesakan Allah dan membedakannya dari makhluk. Akan tetapi *tawhīd* juga dapat diartikan secara luas sebagai kesatuan (*unitas*) seluruh ciptaan – baik manusia maupun alam – dalam relasi-relasi kehidupan. Dengan kata lain, *tawhīd* mengandung pengertian tentang kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam.²⁷ Dengan demikian, umat Islam harus

²⁷ Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), cet. XI, hlm.276

mengakui bukan hanya bahwa Allah adalah esa, tetapi juga mengerti bahwa ada kaitan antara segala sesuatu, termasuk kesatuan yang terjadi di antara seluruh ciptaan Allah.²⁸

Dalam hubungannya dengan manusia, *tawhīd* memiliki implikasi yang luas terhadap konsep manusia yang dalam al-Qur'an digambarkan sebagai makhluk *theomorfis*. Al-Qur'an menyebut manusia sebagai *khalifah Allāh fi al-ardl* (wakil Allah di muka Bumi) sekaligus sebagai hambanya (*'abd*). Manusia dalam konsep *khalifah* adalah *manager of resources* (pengelola sumber daya) di bumi. Sedangkan manusia sebagai *'abd* (hamba Allah) berarti manusia – meskipun memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *ardliyyah* tetapi juga menyadari adanya realitas-realitas *eskatologikal* sehingga ia pun harus bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan di hadapan Tuhan.²⁹

Kemudian, dalam posisinya sebagai *khalifah*, maka manusia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan, sebab ilmu yang merupakan faktor utama yang membuat manusia diberi amanah sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Dengan ilmu itu, Adam sebagai nenek moyang manusia dilebihkan atas malaikat dan makhluk lain yang sempat penasaran untuk meraih *khalifah* di muka bumi ini sehingga mereka memperlakukan pemberian amanah ini kepada manusia.³⁰ Mereka (para malaikat) beralasan bahwa merekalah yang lebih konsisten beribadah kepada Allah daripada manusia yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Allah lalu menjawab: *Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Allah mengajarkan Adam beberapa nama seluruhnya* (Q.S. al-Baqarah 30-33). Dengan “nama” (pengetahuan) yang diajarkan Allah itulah, manusia dijadikan Allah sebagai *khalifah* di bumi. Berdasarkan fungsi manusia sebagai *khalifah*, maka manusia berkewajiban memakmurkan bumi ini dengan cara berlomba-lomba

²⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat (Bandung, Mizan, 1993), hlm. 33

²⁹ Lihat seyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Dunia Modern*, terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 103-105. Bandingkan juga dengan Seyyed Hossein Nasr, *Mejelajah Dunia Modern*, hlm. 40-43.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 106.

meraih kebaikan (*fa astabīq al-khairāt*). Dengan kata lain, konsep *khalīfah* ini sesungguhnya menyangkut kemanusiaan universal tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama dan sebagainya.

Selain itu, konsep *tauhid* sendiri sering dimaknai sebagai keesaan Allah. Doktrin ini secara implisit mengandung sebuah pengertian bahwa selain Allah sudah barang pasti merupakan sebuah keragaman atau kemajemukan (pluralitas). Dengan demikian, kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan kenyataan tersebut, multikulturalisme lalu mengembangkan watak toleransi terhadap keragaman, baik keragaman dalam aspek agama, suku, etnis, budaya atau keragaman pemahaman keagamaan dalam wilayah internal sebuah agama. Bukan sekadar toleransi, multikulturalisme juga mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman tersebut.³¹

Jadi, konsep multikulturalisme ini tidak sekadar toleransi, tetapi lebih menuju kepada penghormatan (*respect*) kepada yang lain (*the others*). Pandangan ini sejalan dengan sikap dasar Islam yang pada intinya menyeru pada semua umat manusia menuju cita-cita bersama dalam bingkai kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. Ini berarti dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antitesis terhadap tauhid, dan dipandang sebagai kemusyrikan dan kejahatan atas kemanusiaan. Pesan ini terkandung dalam al-Qur'an 3: 64: "*Katakanlah: Wahai semua penganut agama (dan kebudayaan)! Mantapkanlah manifesto kesetaraan dan keadilan (melalui dialog) antara kami dan kamu*".³²

Dengan demikian, nilai *sawa'* adalah menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia lain pada tingkat terdalam serta membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai selaksa makna fundamental kehidupan secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya. Secara eksperimental, nilai *sawa'* ini tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antar dunia multikultural yang begitu luas. Ketika manusia hidup melalui

³¹ M Syafi'i Anwar, *Pluralisme, Bukan Sekadar Toleran*, <http://www.tokoh-indonesia.com/ensiklopedi/s/syafii-anwar/berita/01.shtml>

³² [Zakiyuddin Baidhawiy, Ber-Islam Di Era Multikulturalisme, dalam http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=589](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=589)

perjumpaan dengan keragaman budaya, etnik, ras, agama dan sebagainya, maka seolah-olah ia mendapatkan pengalaman antar-kultural (*intercultural experiences*), seperti yang terjadi pada pola-pola sejarah pertentangan berbagai pandangan dunia.

Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multikultural

Pendidikan agama di sekolah umum memiliki landasan ideologis dan konstitusional, karena negara (dalam UUD pasal 29) memberikan hak hidup kepada agama-agama, bahkan berhak mengatur kehidupan beragama bangsanya termasuk pendidikan agama.

Pendidikan agama di sekolah umum, selain memiliki fungsi transformasi pengetahuan keagamaan (ranah kognitif) kepada siswa, juga sebagai sarana yang dianggap efektif dalam proses transformasi norma-norma dan nilai-nilai moral (ranah afektif), meskipun pendidikan agama bukan satu-satunya mata pelajaran yang bertanggung jawab dalam menangani kegiatan pendidikan moral.

Pendidikan agama juga memberikan kontribusi besar dalam pembentukan watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional (pasal 3 UU Sisdiknas). Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spritual.

Pendidikan agama, sebagaimana penjelasan pasal 37 ayat 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pasal 12 ayat 1 (a) UU RI Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang dinyatakan "*setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*".

Melalui kerangka itu, pendidikan agama memiliki beban akademik yang amat berat dalam menghantarkan cita-cita pendidikan Nasional. Ia harus bertanggung jawab atas persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Kita dapat mengambil contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Merosotnya nilai mata uang tidak akan mempersalahkan para ekonom; stres dan depresi yang menjamur

tidak akan mempersalahkan psikolog; roboh dan terbakarnya bangunan tidak akan mempersalahkan insinyur; pertikaian etnik tidak akan mempersalahkan sosiolog; bahkan demonstrasi anarkis tidak akan mempersalahkan politikus. Lalu mengapa dan apa, kebobrokan moral selalu dialamatkan pada pendidikan agama dan agamawan? Inilah tantangan bahkan peluang bagi pendidikan agama dan gurunya untuk merespon persoalan tersebut.

Pendidikan agama dengan pendekatan multikultural merupakan satu upaya untuk menengarai berbagai klaim buruk yang selama ini dialamatkan pada pendidikan agama, selain upaya-upaya seperti integerasi pendidikan agama dengan Iptek; demokratisasi dalam pendidikan agama; dan sebagainya.

Pendidikan agama dalam persepektif multikultural memiliki makna “*penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan agama yang mempertimbangkan segala bentuk keragaman dan perbedaan kultur, baik secara vertikal dan horizontal*”. Hal ini mengingatkan kita kepada pola pemahaman agama yang “kedisinian” dan “kekinian” dalam memahami dan melaksanakan ajarannya. Memang agama diturunkan oleh Tuhan bercirikan universal, tanpa sekat suku, adat, bahasa, dan stratifikasi sosial, ekonomi, dan politik, namun dalam tataran praktis, realisasi ajaran agama akan menunjukkan corak yang unik ketika berada dalam satu konteks zaman, tempat, dan keadaan.

Pendidikan agama dalam persepektif multikultural menurut Indra Djati Sidi memiliki fungsi :³³

- 1 Demokrasi dalam mengakomodir aspirasi, kebutuhan dan kepentingan semua golongan masyarakat yang plural, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan, sehingga polarisasi pro-kontra terhadap pendidikan agama di sekolah dapat diatasi. Bahkan diharapkan pendidikan agama di Indonesia menjadi jembatan bagi keragaman etnik, tradisi, dan bahasa dalam membendung benturan di

³³ Indra Djati Sidi, *Pendidikan Agama di Sekolah Umum dalam Perspektif Multikultural*, dalam “Edukasi : Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan”, vol. 2, Nomor 4, Tahun 2004

era global-multikultural yang penuh kompetisi serta pluralisme agama dan budaya.

- 2 Menepis agamaisasi yang kaku, formalistik, dan eksklusivistik pada pendidikan nasional, karena dengan pendekatan multikultural akan mengarahkan pada keterbukaan interpretasi dan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan agama.
- 3 Menepis tuduhan *islamisasi* perundang-undangan pendidikan nasional, atau pemihakan pemerintah terhadap kaum muslimin. Upaya ini semata-mata memberikan *public service* pendidikan sesuai dengan hak-hak peserta didik, tanpa membedakan agama apapun.

Multikultural dalam pendidikan agama mengarahkan orientasi kurikulum pendidikan agama pada kebersamaan, toleransi, inklusivitas berfikir, dan hormat-menghormati atas kebebasan beragama. Artinya, masing-masing peserta didik merasa aman dan tenang dengan agama yang diyakini, tanpa adanya gangguan yang berarti dari kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama. Dalam hal ini, pola pendidikan religiusitas dengan segala dimensi-dimensi pengetahuan agama (*intellectual involvement*); praktek keagamaan (*ritual involvement*); pengalaman (*experiential involvement*); keyakinan beragama (*ideological involvement*); dan pengalaman beragama (*consequential involvement*) harus lebih ditekankan ketimbang pola ritualisasi, sehingga yang muncul berupa kesadaran dan kearifan beragama.

Pendidikan agama dengan pendekatan multikultural memiliki hubungan simbitotik. Satu sisi pendidikan agama perlu membumi di dalam keragaman kultur, sementara di sisi yang lain keragaman kultur memerlukan perekat yang dapat menengarai segala bentuk perbedaan. Dalam kaitan ini, Indra Djati menyatakan terdapat lima pola hubungan :³⁴

- a. Sinkritisme ; dengan cara mencampuradukan agama menjadi satu dengan kultur, sehingga agama menjadi bagian dari kultur dan kultur menjadi bagian tak terpisahkan dari agama.
- b. *Reconception* ; Menyelami dan meninjau kembali antara pemahaman agama dan pemahaman kultur ketika keduanya dikonfrontasikan.

³⁴ *Ibid*

- c. Sintetis; menciptakan paham baru yang elemen-elemennya diambil dari peleburan agama dan kultur.
- d. Penggantian ; Meyakini bahwa agama merupakan jalan hidup yang paling benar dan menafikan kultur, sehingga berusaha menghapus kultur untuk digantikan dengan agama. Atau sebaliknya.
- e. *Agree in disagreement* ; Setuju dalam perbedaan antara posisi agama dan kultur yang telah disepakati masyarakat.

Barangkali pola yang ke-lima inilah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan simbiotik antara agama dan keragaman kultur. Dalam internal masing-masing pemeluk agama, tafsir *inklusif-pluralis* dalam memahami ajaran agama menjadi prasyarat bagi terealisasinya pendidikan agama berbasis multikultural di Indonesia. Bagaimana mungkin terjadi hubungan dialogis antara dua pihak yang masing-masing *ngotot* mempertahankan pendapatnya sendiri, tetapi jika masing-masing pemeluk agama, terutama yang terlibat langsung di dalam pendidikan memahami akan perbedaan penafsiran, maka pasti inklusivitas multikultural akan terbentuk.³⁵

Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai warga negara agar memiliki persepsi dan sikap multi-kulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas dan minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat.³⁶

³⁵ Aloys Budi Purnomo, *Membangun Teologi Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003

³⁶ HAR. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta : Grasindo, 2004)

Penutup

Pembelajaran agama Islam dengan pendekatan multikultural merupakan proses pembinaan dan pembentukan sikap hidup yang memerlukan landasan pengetahuan serta penanaman nilai dalam diri setiap siswa agar menjadi warga negara yang religius namun inklusif dan bersikap pluralis tanpa mengorbankan basis keagamaan yang dianutnya.

Pendidikan multikultural dalam pendidikan agama (Islam) bukan membina *knowlage skill* pada siswa, karena program pendidikan ini tidak diarahkan untuk tenaga ahli dalam bidang pendidikan multikultural dalam pendidikan agama, tetapi mendidik siswa untuk menjadi warga negara yang religius tapi inklusif dan bersikap pluralis. Dengan demikian, orientasi pembelajaran adalah pembinaan sikap dan perilaku hidup siswa yang tidak hanya akan tercapai dengan desain kurikulum yang komprehensif, tapi juga pendekatan, metode dan teknik pembelajaran yang relevan untuk membentuk sikap ideal tersebut.

Proses pembelajaran dikembangkan secara dinamis dan kombinitif antara tehnik yang berpusat pada guru dengan teknik-teknik yang melibatkan siswa dalam proses belajar, sehingga sikap afektif tumbuh dan berkembang dalam jiwa para siswa. Pengajaran yang berpusat pada guru dan merupakan salah satu bentuk *exposition teaching* (mengajar dengan paparan, atau ceramah) layak untuk digunakan menyampaikan berbagai informasi dalam waktu yang sangat terbatas ~ itupun jika guru itu seorang orator~ dengan disertai alat bantu, slide, video, film atau lainnya.

Sedangkan untuk pembelajaran dengan level pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi memerlukan berbagai strategi yang bervariasi berbasis pelibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Demikian pula dengan pembelajaran untuk tingkat kompetensi psikomotorik yang mengembangkan kemampuan imitasi serta pembiasaan dan penyesuaian. Semuanya juga memerlukan berbagai strategi yang variatif agar dalam proses pembelajaran terasa lebih bermakna dan menyenangkan dengan tanpa meninggalkan maksud dan tujuan yang akan dicapai.

Bahwa begitu banyak wacana tentang strategi pelibatan siswa dalam proses pembelajaran, baik itu *student centered instruction* (pembelajaran berpusat pada siswa), *active learning* (belajar aktif) atau *self discovery learning*

(belajar melalui penemuan sendiri), *colaborative learning* (belajar bersama antara guru dengan siswa), dan *cooperative learning* (belajar bersama dan saling membantu satu sama lain).

Drs. H. M. Sahan, MA ; *Ketua dan Dosen STAI Madinatun Najah Rengat – Indragiri Hulu.*